



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 11 Juni 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Polisi Tegur 100 Sopir Kendaraan Kelebihan Muatan Setiap Hari

SIDOARJO - Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) atau membawa muatan berlebihan mendapat atensi polisi. Setiap hari, Satlantas Polresta Sidoarjo menegur sekitar 100 sopir kendaraan yang kelebihan muatan.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Ali Rifqi Mubarak mengungkapkan, kendaraan ODOL yang ditindak dalam sehari sekitar 100 kendaraan. Mayoritas adalah truk. "Bentuk penindakannya berupa teguran tertulis," katanya kemarin (10/6).

Fenomena ODOL, lanjutnya, mendapat perhatian langsung dari Korlantas Polri. Bulan lalu setiap polres diberi tugas untuk memberantas. "Untuk sementara masih tahap sosialisasi. Jadi belum ditilang. Bulan depan baru mulai ditilang," ujarnya. Namun, teguran bukan sekedar lisan. Nopol ken-



SATLANTAS POLRESTA SIDOARJO

#### TITIK RAWAN KENDARAAN ODOL

1. Jalan Raya Taman
2. Jalan Raya Krian
3. Jalan Raya Balongbendo
4. Jalan Bypass Juanda
5. Jalan Arteri Porong

Sumi Satlantas Polresta Sidoarjo

**RAWAN KECELAKAAN:** Polisi menghentik truk dengan muat berlebihan di Jala Raya Medaeng, Taman, kemarin (10/6).

daraan dan identitas pengemudi dicatat. "Misalnya di kemudian hari kembali kedapatan melanggar langsung ditilang. Jadi, tidak menunggu bulan depan karena sudah mendapat peringatan," paparnya. Dia menjelaskan, ODOL

mendapat atensi khusus karena keberadaannya menimbulkan persoalan seperti potensi kecelakaan lalu lintas. "Beban yang terlalu berat secara otomatis berdampak langsung ke kondisi kendaraan terangnya. (edi/uzi)

### Warga Keluhkan TPST Ngampelsari Kumuh dan Berbau

#### Pemkab Akan Ambil Alih Pengelolaan

SIDOARJO - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Ngampelsari, Candi, resmi diambil alih Pemkab Sidoarjo kemarin (10/6). Penyebabnya, warga sering mengeluh TPST yang dikelola pemdes tersebut terlalu dekat dengan pemukiman, berbau, hingga kumuh. Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung melihat kondisi TPST tersebut kemarin. Subandi mengatakan, pengelolaan TPST akan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). "Warga sekitar sudah banyak yang mengeluh. Biar tidak jadi masalah berkepanjangan, kita tarik ke DLHK, biar DLHK yang bertanggung jawab penuh," ujarnya. Subandi bahkan mengancam menutup TPST jika permasalahan tak kunjung runtuh. "Saya ingin ini tuntas, kalau masih seperti ini, saya tutup," katanya. Menurutnya, kondisi TPST



SERING DIPROTES: Alat berat diterjunkin untuk mengangkut sampah di TPST Ngampelsari, Candi, kemarin (10/6).

#### POLEMIK TPST NGAMPELSARI

- Bupati terima keluhan warga soal sampah berserakan dan berbau tidak sedap di sekitar TPST Ngampelsari
- Bupati perintahkan TPST yang sebelumnya dikelola pemdes, untuk dikelola DLHK
- DLHK turunkan lima truk dan alat berat untuk pembersihan sampah di sekitar TPST

Sumber: Pemkab Sidoarjo

mendapatkan mandat dari Bupati Subandi. "Kondisi TPST yang selama ini dikelola warga sudah berulang kali menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah," ungkapnya. Selepas sidak, DLHK langsung menerjunkan 15 truk dan alat berat untuk bersih-bersih area sekitar TPST. Nantinya DLHK akan menyusun ulang sistem pengelolaan TPST di sana agar lebih teratur. "Kami coba selesaikan hari ini juga, kami kerahkan semua sumber daya untuk itu," paparnya. (eza/uzi)

# Respons Keluhan Warga, Pemkab Ambil Alih TPS3R Ngampelsari

#### Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi bersama dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) meninjau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Dusun Kedinding, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Selasa (10/6).

Sidak dilakukan Bupati Subandi usai menerima keluhan warga jika sampah di TPS3R Ngampelsari menumpuk. Dampaknya, bau busuk menyengat menyebar ke permukiman yang dekat dengan TPS3R.

Sidak itu dilakukan bersama Kapolresta Kombespol Christian Tobing dan Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Usai sidak, bupati memerintahkan DLHK untuk mengambil alih pengelolaan TPS3R Ngampelsari.

"Saya mohon maaf dan agar DLHK menjadi masalah yang berkepanjangan, saya perintahkan DLHK agar pen-

gelolaan diambil alih kita (pemkab). Hari ini juga saya minta untuk diselesaikan," tegas Subandi.

Subandi berharap setelah diambil alih DLHK, pengelolaan sampah tersebut bisa lebih tertib, tidak kembali menumpuk dan menimbulkan bau. Di samping itu, ia terus mendorong pemerintah desa untuk membuat aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

"TPS ini penting karena Ngampelsari padat penduduk. Harus ada ketegasan dari desa, RT, RW, dan semua perangkat agar lingkungan



Bupati Sidoarjo Subandi sidak kondisi TPS3R Ngampelsari.

bersih dan sehat," jelasnya.

Kepala DLHK Bahrul Amig menyebutkan, usai tanggung jawab pengelolaan diterima, terungkap jika TPS3R tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah. "Kita selesaikan hari ini juga. Kami kerahkan 15

truk dan alat berat untuk mengangkat dan membersihkan seluruh sampah di lokasi. Setelah bersih, tim kami akan atur ulang tata kelola TPS," jelas Amig.

Amig juga memastikan tidak akan ada kekosongan layanan. Seluruh alur dis-

tribusi sampah dari warga tetap berjalan seperti biasa. "Jangan khawatir. Kami jamin pelayanan tetap berjalan. Ini hanya soal peralihan pengelolaan. Mulai hari ini yang lama sudah domisioner, DLHK yang pegang kendali," pungkasnya. (kri/san/ep)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



LOETFI/DUTA

Kabid Perumahan saat meninjau kondisi PSU atau Fasum/Fasos salah satu perumahan di Sidoarjo.

## PSU Tidak Diserahkan, Pemkab Siap Beri Sanksi Pengembang

**SIDOARJO** - Minimnya pemahaman pengembang perumahan terkait pengelolaan serta penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) atau Fasum/Fasos ke pemerintah daerah, dan juga masyarakat menjadi sorotan serius Pemkab Sidoarjo. Dari total 535 perumahan, baru sekitar 120 yang menyerahkan PSU-nya ke pemerintah.

Sebab disamping selain permasalahan tersebut, dampak pembangunan proyek perumahan selain permasalahan Fasum/Fasos, terkadang mendapat protes warga setempat baik perihal dampak debu, banjir dan lain sebagainya.

Seperti baru-baru ini pembangunan perumahan di wilayah Desa Sepande Kec. Sidoarjo yang diprotes warga karena menyebabkan banjir puluhan rumah warga. Karena proyek pembangunan perumahan rawan di protes warga akan dampaknya.

Kepala Bidang Perumahan

Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (P2CKTR), Sutejo, saat ditemui [duta.co](http://duta.co) pada Selasa (10/9/25), menegaskan pentingnya percepatan penyerahan PSU sebagai

bentuk tanggung jawab pengembang terhadap pemerintah dan masyarakat.

"Jumlah ini masih sangat jauh dari yang seharusnya. Penyerahan PSU merupakan kewajiban mutlak pengembang karena nantinya menjadi aset milik pemerintah daerah," ujar Sutejo.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2024, penyerahan PSU dilakukan dalam dua tahap, yakni secara administratif dan fisik.

Penyerahan administratif dilakukan setelah siteplan atau SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) disahkan.

Penyerahan fisik dilakukan setelah pembangunan perumahan selesai dan melewati masa pemeliharaan minimal satu tahun.

Dalam ketentuan itu, pengembang wajib menyediakan minimal 40 persen dari luas lahan untuk PSU. Sisanya dapat dimanfaatkan untuk area komersial atau dijual.

Namun, Sutejo mengakui bahwa tingkat kepatuhan pengembang masih rendah. Banyak di antaranya belum merespons upaya penagihan PSU yang telah dikirimkan oleh pemerintah daerah.

"Kami telah mengirimkan teguran dan terus melakukan penagihan kepada pengembang yang belum menyerahkan PSU-nya," tegasnya.

Pemkab juga intens melakukan sosialisasi melalui organisasi pengembang seperti REI, Himpera, dan Appersi agar para pelaku usaha perumahan memahami serta mematuhi aturan yang berlaku.

Apabila pengembang tetap mengabaikan kewajiban tersebut, sanksi administratif akan diberlakukan.

Lebih lanjut, Sutejo menjelaskan bahwa penyerahan PSU memberi manfaat besar, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset-aset PSU yang telah resmi diserahkan dapat dikelola menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman, jalan lingkungan, drainase, dan berbagai fasilitas sosial lainnya.

"Dengan PSU yang sudah menjadi aset Pemda, kami bisa melakukan perawatan, pembangunan lanjutan, dan pemanfaatan ruang secara optimal. Ini bentuk pelayanan nyata kepada masyarakat agar bisa hidup di lingkungan yang lebih tertata, sehat, dan layak huni," pungkasnya. • Loe

# Polisi Tegur 100 Sopir Kendaraan Kelebihan Muatan Setiap Hari

**SIDOARJO** - Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) atau membawa muatan berlebihan mendapat atensi polisi. Setiap hari, Satlantas Polresta Sidoarjo menegur sekitar 100 sopir kendaraan yang kelebihan muatan.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Ali Rifqi Mubarak mengungkapkan, kendaraan ODOL yang ditindak dalam sehari sekitar 100 kendaraan. Mayoritas adalah truk. "Bentuk penindakannya berupa teguran tertulis," katanya kemarin (10/6).

Fenomena ODOL, lanjutnya, mendapat perhatian langsung dari Korlantas Polri. Bulan lalu setiap polres diberi tugas untuk memberantas. "Untuk sementara masih tahap sosialisasi. Jadi belum ditilang. Bulan depan baru mulai ditilang," ujarnya. Namun, teguran bukan sekedar lisan. Nopol ken-



SATLANTAS POLRESTA SIDOARJO

## TITIK RAWAN KENDARAAN ODOL

1. Jalan Raya Taman
2. Jalan Raya Krian
3. Jalan Raya Balongbendo
4. Jalan Bypass Juanda
5. Jalan Arteri Porong

Sumber: Satlantas Polresta Sidoarjo

**RAWAN KECELAKAAN:** Polisi menghentikan truk dengan muatan berlebihan di Jalan Raya Medaeng, Taman, kemarin (10/6).

daraan dan identitas pengemudi dicatat. "Misalnya di kemudian hari kembali kedapatan melanggar langsung ditilang. Jadi, tidak menunggu bulan depan karena sudah mendapat peringatan," paparnya.

Dia menjelaskan, ODOL

mendapat atensi khusus karena keberadaannya rawan menimbulkan persoalan seperti potensi kecelakaan lalu lintas. "Beban yang terlalu berat secara otomatis pasti berdampak langsung ke kondisi kendaraan," terangnya. (edi/uzi)

## Jawa Pos

# Warga Keluhkan TPST Ngampelsari Kumuh dan Berbau

## Pemkab Akan Ambil Alih Pengelolaan

**SIDOARJO** - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Ngampelsari, Candi, resmi diambil alih Pemkab Sidoarjo kemarin (10/6). Penyebabnya, warga sering mengeluh TPST yang dikelola pemdes tersebut terlalu dekat dengan permukiman, berbau, hingga kumuh. Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung melihat kondisi TPST tersebut kemarin.

Subandi mengatakan, pengelolaan TPST akan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). "Warga sekitar sudah banyak yang mengeluh. Biar tidak jadi masalah berkepanjangan, kita tarik ke DLHK, biar DLHK yang bertanggung jawab penuh," ujarnya.

Subandi bahkan mengancam menutup TPST jika permasalahan tak kunjung rampung. "Saya ingin ini tuntas, kalau masih seperti ini, saya tutup," katanya. Menurutnya, kondisi TPST



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**SERING DIPROTES:** Alat berat diterjunkan untuk mengangkut sampah di TPST Ngampelsari, Candi, kemarin (10/6).

### POLEMIK TPST NGAMPELSARI

- Bupati terima keluhan warga soal sampah berserakan dan berbau tidak sedap di sekitar TPST Ngampelsari
- Bupati perintahkan TPST yang sebelumnya dikelola pemdes, untuk dikelola DLHK
- DLHK turunkan lima truk dan alat berat untuk pembersihan sampah di sekitar TPST

Sumber: Pemkab Sidoarjo

Ngampelsari sudah masuk kategori darurat lingkungan.

Kepala DLHK Sidoarjo M Bahrul Amig siap mengelola TPST dengan serius usai

mendapatkan mandat dari Bupati Subandi. "Kondisi TPST yang selama ini dikelola warga sudah berulang kali menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah," ungkapnya.

Selepas sidak, DLHK langsung menerjunkan 15 truk dan alat berat untuk bersih-bersih area sekitar TPST. Nantinya DLHK akan menyusun ulang sistem pengelolaan TPST di sana agar lebih teratur. "Kami coba selesaikan hari ini juga, kami kerahkan semua sumber daya untuk itu," paparnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**RETAK:** Pembatas tengah jalan buatan warga terpasang di jembatan Jetis, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, yang rusak kemarin (10/6). Pemkab akan memperbaiki tahun ini.

## Khawatir Ambrol, Jembatan Jetis Diberi Pembatas Jalan

### Agar Tidak Dilewati Mobil

**SIDOARJO** - Warga sekitar jembatan Jetis, Kelurahan Lemahputro, secara swadaya memasang pembatas di tengah jembatan kemarin (10/6). Tujuannya, mencegah mobil agar tidak melewati jembatan yang sedang rusak tersebut.

Sebab, mobil-mobil masih kerap melintas jembatan Jetis

tersebut, meski sudah ada pemberitahuan di depan gapura. "Ini untuk antisipasi agar mobil *nggak* lewat," ujar Lukman, salah satu warga kemarin (10/6).

Menurutnya, banyak mobil pengantar murid SMP yang masih melewati jembatan yang jadi akses alternatif dari Jalan Gajah Mada yang menuju Jalan Diponegoro itu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Eka Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Ka-

bupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi jembatan tersebut. "Kami upayakan secepatnya perbaikan, tahun ini," jelasnya.

Dari hasil tinjauannya, beberapa titik jembatan mengalami keretakan dan keropos sehingga perlu penanganan sebelum makin parah. Proses perbaikannya saat ini sedang dalam tahap perencanaan teknis dan akan segera ditindaklanjuti. (eza/uzi)

# Jawa Pos

# Respons Keluhan Warga, Pemkab Ambil Alih TPS3R Ngampelsari

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi bersama dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) meninjau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Dusun Kedinding, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Selasa (10/6).

Sidak dilakukan Bupati Subandi usai menerima keluhan warga jika sampah di TPS3R Ngampelsari menumpuk. Dampaknya, bau busuk menyengat menyebar ke permukiman yang dekat dengan TPS3R.

Sidak itu dilakukan bersama Kapolresta Kombespol Christian Tobing dan Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Usai sidak, bupati memerintahkan DLHK untuk mengambil alih pengelolaan TPS3R Ngampelsari.

"Saya mohon maaf dan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, saya perintahkan DLHK agar pen-

gelolaan diambil alih kita (pemkab). Hari ini juga saya minta untuk diselesaikan," tegas Subandi.

Subandi berharap setelah diambil alih DLHK, pengelolaan sampah tersebut bisa lebih tertib, tidak kembali menumpuk dan menimbulkan bau. Di samping itu, ia terus mendorong pemerintah desa untuk membuat aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

"TPS ini penting karena Ngampelsari padat penduduk. Harus ada ketegasan dari desa, RT, RW, dan semua perangkat agar lingkungan



Bupati Sidoarjo Subandi sidak kondisi TPS3R Ngampelsari.

bersih dan sehat," jelasnya.

Kepala DLHK Bahrul Amig menyebutkan, usai tanggung jawab pengelolaan diterima, terungkap jika TPS3R tidak maksimal. Kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah. "Kita selesaikan hari ini juga. Kami kerahkan 15

truk dan alat berat untuk mengangkat dan membersihkan seluruh sampah di lokasi. Setelah bersih, tim kami akan atur ulang tata kelola TPS," jelas Amig.

Amig juga memastikan tidak akan ada kekosongan layanan. Seluruh alur dis-

tribusi sampah dari warga tetap berjalan seperti biasa. "Jangan khawatir. Kami jamin pelayanan tetap berjalan. Ini hanya soal peralihan pengelolaan. Mulai hari ini yang lama sudah domisioner, DLHK yang pegang kendali," pungkasnya. (kri/san/epe)

memo x

# BMKG Juanda: Potensi Hujan Ringan di Pekan Kedua Juni

KOTA-Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Sidoarjo dan sekitarnya pada pekan kedua bulan Juni. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda, meskipun beberapa wilayah di Ja-

wilayah Sidoarjo dan Surabaya.

"Dari pantauan kami, masih terlihat gangguan atmosfer yang memungkinkan hujan ringan turun di beberapa wilayah, termasuk Sidoarjo dan Surabaya," ujarnya. Selasa (10/6). Cuaca yang tidak stabil membuat hujan me-

...berapa wilayah di da-  
wa Timur telah mema-  
suki musim kemarau.

Prakirawan BMKG  
Juanda, Rastina, men-  
jelaskan bahwa saat ini  
masih terpantau ada-  
nya gangguan atmosfer  
yang menyebabkan  
hujan tetap berpeluang  
terjadi, termasuk di

...di beberapa hujan ma-  
sih mungkin terjadi  
meskipun musim ke-  
marau sudah mulai  
berlangsung. Oleh ka-  
rena itu, BMKG belum  
bisa memastikan seca-  
ra pasti waktu terjadi-  
nya hujan, apakah si-  
ang atau malam hari.

● Ke Halaman 10



CS Scanned with CamScanner

IST

**RAIB: Motor Honda Beat milik korban hilang di Sidoarjo.**

## BMKG Juanda:...

"Pola cuaca yang dinamis akibat gangguan atmosfer membuat prakiraan waktu hujan menjadi sulit diprediksi dalam jangka pendek, jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah wilayah di Jawa Timur belum sepenuhnya kering meskipun secara kalender telah memasuki awal musim kemarau. BMKG Juanda terus melakukan pemantauan harian untuk memantau perkembangan cuaca yang

masih fluktuatif.

Sebagai langkah antisipatif, BMKG Juanda juga telah memberikan imbauan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tetap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (sai/vga)



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

TERIMA LAPORAN: Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau TPST Ngampelsari di Kecamatan Candi.

# Banyak Keluhan, TPST Ngampelsari Diambil Alih DLHK

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, resmi diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Pengelolaan TPST tersebut kini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo.

M Saiful Rohman, Wawancara Radar Sidoarjo

## Nasib TPST Desa Ngampelsari

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lokasi TPST            | Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi  |
| Pihak Pengelola Lama   | Dikelola oleh warga  |
| Pihak Pengelola Baru   | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)   |
| Alasan Pengambilalihan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak keluhan warga</li> <li>- Lokasi kumuh</li> <li>- Dekat permukiman</li> <li>- Bau menyengat</li> </ul>  |
| Solusi                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siap menutup TPST jika tidak ada perbaikan</li> <li>- Serahkan tanggung jawab penuh ke DLHK</li> <li>- 15 truk dan alat berat dikerahkan</li> </ul> |
| Tindakan DLHK          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembersihan area langsung dilakukan</li> <li>- Penataan ulang sistem pengelolaan</li> </ul>   |



DIBERSIHKAN: Petugas menaikan sampah ke truk DLHK.

LANGKAH ini diambil setelah muncul banyak keluhan dari warga sekitar. Selain terlihat kumuh, lokasi TPST dinilai terlalu dekat dengan permukiman dan menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan warga.

Sudah banyak komplain dari masyarakat. Supaya tidak menjadi masalah berkepanjangan, pengelolaannya



kami serahkan ke DLHK. Mereka yang akan bertanggung jawab penuh," ujar Bupati Sidoarjo, Subandi, saat meninjau langsung TPST, Selasa (10/6).

Subandi menegaskan, permasalahan ini harus segera dituntaskan. Ia bahkan menyatakan tidak segan untuk menutup TPST jika





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Sebagaimana telah banyak diketahui, belum sebulan pasca dilantik, tepatnya sekitar pertengahan Bulan Maret lalu, publik Sidoarjo dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 22 detik yang berisi pernyataan Subandi yang menuding bahwa banyak program Anggita dewa yang terangkum dalam program Pokir selain tidak sesuai dengan misi dan misi bupati. Juga program kerja yang digagas dan dilakukan seluruh anggota dewan se Nusantara itu berpotensi besar terjadi korupsi. Dalam pernyataannya Subandi juga menyindir bahwa selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo yang bekerja keras mengumpulkan uang guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo itu, hanya bisa menghambur – hamburkan uang. Unggahan video yang beredar luas di medsos terutama Tiktok tersebut tak pelak membuat seluruh anggota DPRD Sidoarjo selain meradang yang berbuntut dengan tidak harmonisnya hubungan kerja Bupati Subandi dengan legislatif sampai saat ini. (Dil)







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Pernyataan tegas 6 fraksi DPRD ini diungkapkan dalam sidang paripurna ke 2 yang digelar diruang sidang utama DPRD Selasa (10/6) siang hingga jelang sore tadi.

Paripurna dengan agenda utama penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati-Wakil Bupati dalam sidang paripurna sebelumnya (ke 1) tentang Raperda Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2024 tadi sempat molor 1 jam lebih dari yang dijadwalkan semula (pukul 0.13.00) karena menunggu kedatangan Subandi.

Namun pimpinan dan seluruh anggota dewan yang hadir memutuskan untuk memulai agenda sidang karena hingga lepas pukul 0.14.00, Subandi tidak menampakkan batang hidungnya. Sementara Wakil Bupati Mimik Idayana terlebih dahulu hadir diruang sidang meski juga sedikit terlambat dari jadwal.

Melalui juru bicaranya, secara bergantian 6 fraksi selain dengan tegas meminta Subandi untuk selain segera menarik ucapannya serta meminta maaf secara terbuka karena telah membuat kegaduhan serta membuat hubungan kerja antara pemerintah (eksekutif)! dan lembaga Legislatif menjadi tidak kondusif.

"Pernyataan saudara bupati dalam video itu jelas sangat menciderai bahkan lebih jauh telah melecehkan keberadaan lembaga resmi negara serta dilindungi undang-undang" tegas Pratama Yudiarto SH Jubir F Gerindra saat penyampaian PU.

Lebih jauh dalam penyampaian nota PU\_nya, ucapan Subandi dalam video yang juga menyatakan bahwa salah satu program Pokok pikiran (Pokir) dewan tidak sesuai dengan Visi dan Misi bupati adalah pernyataan yang ngawur dan sama sekali tidak berdasar.

"Untuk itu Fraksi Gerindra butuh klarifikasi dari saudara bupati atas berbagai pernyataan yang membuat kegaduhan tersebut" tandasnya.

Selain 2 hal tersebut, F Gerindra juga memberi catatan khusus terhadap kinerja Bupati Subandi terkait masih lemahnya lembaga pengawasan di internal birokrasi terutama dalam hal pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan

kewenangan, dugaan jual beli jabatan, pungli dalam program bantuan PTSL serta berbagai catatan negatif atas pencapaian target pertumbuhan bidang ekonomi.

Tuntutan tak kalah tegas juga disampaikan oleh 5 fraksi lain, dimana F PKB, melalui jubirnya, H Roziq, fraksi PKB selain mengecam keras pernyataan Subandi sebagaimana terungkap dalam video pendek yang sempat menghebohkan tersebut.

FPKB dalam nota PU\_nya selain dengan tajam memberi catatan khusus terhadap pencapaian serta penilaian kinerja Subandi dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun 2024.

Berdasarkan hasil kajian dan analisa dewan, masih banyak praktik-praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan serta pungli terjadi di kalangan birokrasi.



"Beberapa Kepala desa (Kades) yang terjaring OTT dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo beberapa waktu lalu adlah salah satu contohnya" ujar Roziq.

Bahkan FPKB dalam kasus OTT Kades ini menduga ada campur tangan/intervensi dari sejumlah oknum pejabat tinggi daerah agar kasus OTT ini tidak berlanjut/dipeti eskan.

"Khusus untuk ini, kami dari FPKB meminta klarifikasi dari saudara bupati" timpal Legislator asal Jabon ini.

Penegasan tak berbeda juga diungkapkan 4 fraksi lain, yakni FPDIP, FPAN, FPKS-PPP serta FNasdem-Demokrat.

Selain meminta Subandi untuk melakukan upaya sebagaimana tuntutan fraksi tersebut diatas, F Nasdem-Demokrat dan FPAN juga memberi catatan khusus terkait masih tidak jelasnya realisasi kerja sama antara Developer dan jajaran REI (Real Estate Indonesia) Sidoarjo dalam hal konsesi pembelian/pengadaan tanah/lahan untuk fasilitas makam bagi warga perumahan se\_Kabupaten Sidoarjo.

"Kami juga minta agar bupati bisa memberikan penjelasan yang detail soal ini karena berdasarkan data dan laporan yang kami terima, terhitung sejak tahun 2016 hingga saat ini, pengembang telah menyetor uang konsesi pembelian lahan untuk makan kepada REI sebesar Rp 33 miliar.

"Ini harus segera dijelaskan karena selain ini bagian dari tanggung jawab bupati selaku kepala daerah, keberadaan uang ini harus dilakukan audit terbuka karena uang itu harusnya digunakan untuk membeli lahan makam umum. Tapi sampai saat ini belum ada satupun realisasi pembelian lahan yang dilakukan REI" papar Dimas Ketua F Nasdem-Demokrat saat ditemui awak media usai sidang.

Sementara dari total 7 fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo, hanya FGolkar yang tidak mengecam Subandi. Dalam penyampaian PU yang disampaikan Jubinya, Dian Felani, F Golkar malah memberi apresiasi atas kinerja Subandi yang mendapatkan catatan WTP (Wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2024.

Penyampaian PU yang sangat singkat, jelas dan berpihak ini tak urung mendapat sorakan dari anggota fraksi, "huuuuuuu, maklum lah Golkar dah dapat banyak" celetuk salah seorang anggota dewan yang disambut dengan sorakan.

Ditanya bagaimana bila Bupati Subandi ternyata tak bersedia menarik ucapan dan meminta maaf secara terbuka? "Y silahkan saja, itu hak yang bersangkutan. Yang pasti kami juga akan terus melakukan upaya-upaya tekanan (politik) lain" tegas politisi muda yang juga Ketua Partai Nasdem Sidoarjo ini saat ditemui awak media usai sidang.

Lontaran tak kalah pedas diungkapkan anggota dewan yang juga merangkap Jubir FPDIP, Kusumo Adi Nugroho, "Kalau nggak bersedia menarik pernyataan dan minta maaf, saran saya sebaiknya berhenti saja jadi bupati" sergah Kusumo sambil bergegas pergi.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## DINAMISNYA DPRD SIDOARJO; 6 Fraksi Tuntut Bupati Minta Maaf, Golkar Disambut Sorak HUUUUU....!!!

"Kalau tidak mau minta maaf secara terbuka, ya jangan jadi bupati," ujar Kusuma Adhi, Jubir Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo..

🕒 Jun 10, 2025 - 23:14



*Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo diwarnai tuntutan enam fraksi kepada Bupati Subandi agar minta maaf secara terbuka.*

NUSADAILY – SIDOARJO: Eksistensi kekuatan politik Bupati Subandi di lembaga parlemen Sidoarjo, semakin 'terjepit'. Setelah sempat 'diboikot' pada sidang paripurna LPj pelaksanaan APBD 2024, kali ini mayoritas anggota DPRD Sidoarjo menuntut agar Bupati Subandi meminta maaf secara terbuka atas statemennya yang dinilai menciderai marwah lembaga legislatif setempat.

Ini tersirat dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo lanjutan dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda atas Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, pada Selasa (10/6/2025) sore.

Sidang berlangsung dua jam dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih, dengan didampingi dua wakilnya, Suyarno dan Kayan SH. Sedangkan Bupati Subandi sendiri yang tidak hadir,--atau dia diwakili Wakil Bupati Mimik Idayana.



Sesuai agenda sidang, tujuh fraksi di lembaga parlemen itu,--di antaranya Fraksi Gerindra, PKB, PDIP, Golkar, PAN, Nasdem-Demokrat dan fraksi PKS-PPP telah diberi kesempatan sama dalam menyampaikan pandangan umum pada sidang paripurna tersebut.

Di sela-sela berbagai permasalahan yang disorot, ada satu hal yang begitu 'menggoda' sekaligus membuat suasana ruang sidang langsung 'menghangat'. Ini karena sebagian besar kekuatan politik di parlemen,--dari tujuh fraksi, enam di antaranya, yakni Gerindra, PKB, PDIP, PAN, Nasdem-Demokrat dan PKS-PPP mengungkapkan tuntutan mereka kepada Bupati Subandi agar meminta maaf secara terbuka, sekaligus menarik kembali statemennya yang dinilai menciderai marwah DPRD.

Statemen Bupati Subandi yang dimaksud, itu terjadi pada 19 Maret 2025. Merujuk pandangan umum Fraksi Gerindra bahwa dia pernah mengatakan: "...banyak PR bahwa, pikir itu kadang tidak sesuai dengan visi misi bupati. Kalau tidak sesuai dengan visi-misi bupati tentu banyak persoalan yang kira-kira mengarah korupsi. Ini harus kita lakukan kebijakan-kebijakan apa untuk menyelesaikannya. Karena mohon maaf, bupati dan wakil bupati bekerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). *Kene sing golek duwek, DPR menghambur-hamburkan uang...*

Dari statemen itu, menurut mereka telah menyulut disharmoni komunikasi antara lembaga eksekutif dengan legislatif. "Perlu dipahami kepala daerah dan DPRD dipilih melalui proses politik, tentunya memiliki masing-masing visi-misi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau konstituen pendukung di daerah pemilihan masing-masing," kata Pratama Yudhiarto SH, juru bicara Fraksi Gerindra.

Tidak berbeda ditegaskan para jubir dari fraksi lainnya, bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sejajar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Keduanya merupakan mitra sejajar dengan fungsi berbeda. "Pernyataan bupati ini jelas-jelas mendiskreditkan lembaga DPRD. Ini perlu diklarifikasi," kata M. Rojik, jubir fraksi PKB.

Begitu pula tuntutan dari jubir PDIP, PAN, Nasdem-Demokrat maupun PKS-PPP. "Untuk menjaga marwah lembaga legislatif ini, kami meminta bupati menarik pernyataan tersebut, sekaligus maaf secara langsung dan terbuka melalui media cetak maupun media online," kata Kusuma Adhi, jubir fraksi PDIP.

Bagaimana jika bupati tidak memenuhi tuntutan itu, Kusuma Adhi, dengan tegas memberi tekanan itu sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan Bupati Subandi karena 'melecehkan' marwah lembaganya. "Kalau tidak mau minta maaf, ya jangan jadi bupati," ujar Kusuma.

Perlu diketahui pula, dalam sidang paripurna ini hanya fraksi Golkar yang tidak mengemukakan tuntutan kepada Bupati Subandi agar meminta maaf atas statemennya tersebut. Sehingga begitu jubirnya turun dari podium, setelah selesai membacakan pandangan umum, langsung disambut serempak sebagian besar para legislator di sana dengan nada koor; huuuuuuuuuu...huuuuuuuuu...!!

Setidaknya telah mengindikasikan dalam permasalahan ini sikap politik fraksi partai berlambang pohon itu tidak 'seirama' dengan mayoritas legislator yang tergabung dalam enam fraksi tersebut. Atau sebuah representasi bahwa kalkulasi kekuatan politik Bupati Subandi di lembaga DPRD benar-benar sudah tergerus. Jika semula dia mendapat dukungan kuat dari Gerindra, Demokrat dan Golkar sebagai partai pengusung pada Pilkada 2024, kini petanya telah berubah dratis.

Kekuatan politik Bupati Subandi, sepertinya tinggal tertumpuh kepada Golkar (5 kursi) semata. Sedangkan Gerindra dan Demokrat, sebagai kekuatan politik yang juga representatif di lembaga legislatif itu, telah meninggalkannya. Atau sebaliknya, Bupati Subandi yang meninggalkan mereka, seiring dengan konstelasi politik yang begitu dinamis di Sidoarjo dalam sebulan terakhir ini. (\*cak ful)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Ucapkan Dewan Hamburkan Uang dan Pokir Potensi Korupsi, 6 Fraksi DPRD Kompak Minta Bupati Sidoarjo Minta Maaf Terbuka



Republikjatim.Com

Selasa, 10 Jun 2025 21:08 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo mengambil sikap kompak. Keenam fraksi ini, meminta Bupati Sidoarjo Subandi untuk meminta maaf dan klarifikasi secara terbuka atas pernyataannya soal tugas dewan menghambur-hamburkan uang dan soal Pokok-Pokok Pikiran (Pikir) dewan rawan dengan kasus tindak pidana korupsi.

Kekompakan keenam faksi itu, disampaikan para Juru Bicara (Jubir) masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/06/2025) sore.



Selasa, 10 Jun 2025 16:25 WIB

### **Usai Dikeluhkan Warga, Pemkab Sidoarjo Ambil Alih Penanganan TPS3R Ngampelsari Candi yang Berbau Busuk**

Keenam fraksi di DPRD Sidoarjo yang meminta Subandi minta maaf dan klarifikasi itu, diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PKS/PPP serta Fraksi Nasional Demokrat (gabungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat). Sedangkan satu fraksi yang tidak terusik dengan ucapan Bupati Sidoarjo Subandi yang memicu kegaduhan politik di Sidoarjo itu, hanya Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu partai pendukung dan pengusung Bupati Sidoarjo Subandi dalam Pilkada akhir 2024 kemarin.

Sontak rapat paripurna yang biasanya landai-landai dan tenang, sempat dipenuhi tepuk tangan dan pujian usai para Jubir Fraksi membacakan PU masing-masing fraksi. Bahkan, saat salah satu fraksi tidak terusik dengan cemoohan Bupati Sidoarjo yang baru menjabat resmi beberapa bulan ini, justru disoraki para peserta Rapat Paripurna beserta para undangan yang hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo lantai dua itu.

Tidak tanggung-tanggung seluruh fraksi meminta Bupati Sidoarjo, Subandi secara tegas dan sadar meminta maaf dan klarifikasi kepada seluruh anggota dan pimpinan dewan secara terbuka. Baik itu, dalam forum resmi dapat paripurna atau dalam bentuk rapat lainnya dengan catatan harus disertai di media cetak dan online.

Alasan para pimpinan dan anggota keenam fraksi itu, selain pernyataan Bupati Sidoarjo dianggap mendiskreditkan tugas dan lembaga dewan juga dinilai menjerumuskan sekaligus memberi efek negatif bagi kinerja dewan. Terutama, saat pernyataan Bupati Sidoarjo didengarkan warga atau konstituen para anggota dewan. Bahkan pernyataan itu, sempat membuat kegaduhan politik di kalangan eksekutif dan legislatif.

Selain itu, permintaan maaf dan klarifikasi itu sebagai sikap politik sekaligus bentuk pernyataan politisi yang gantlement sebagai pimpinan daerah. Desakan permintaan maaf itu, sekaligus untuk mengembalikan marwah pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo. Apalagi, selama ini sebanyak 50 anggota dewan maupun Bupati Sidoarjo dinilai memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan publik. Apalagi, sama-sama dipilih oleh rakyat Sidoarjo secara langsung.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Pembacaan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi Partai Gerindra dengan Jubir Pratama Yudhiarto. Karena mesti perolehan kursi terbanyak dari Fraksi PKB, akan tetapi yang lebih siap membacakan PU Fraksi adalah dari perwakilan Fraksi Partai Gerindra.

"Respon Fraksi Partai Gerindra atas pernyataan sikap Bupati Sidoarjo yang menyebutkan Pokir tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati bisa mengarah korupsi serta pernyataan kene (Bupati) seng golek duit DPRD seng menghamburkan uang. Maka, Fraksi Partai Gerindra menilai Kepala Daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga sejajar dan menjadi mitra kerja dalam fungsi yang berbeda.

Karena itu, Sikap politik sesuai dengan Tata Tertib (Tatib 2024) dan demi mengembalikan marwah dewan, kami mohon kepada saudara Bupati untuk minta maaf terbuka secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik," ujar Pratama Yudhiarto membacakan PU Fraksi Partai Gerindra.



Desakan yang sama disampaikan dalam PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jubir fraksi M Rojik. Fraksi PKB meminta Bupati Sidoarjo Subandi untuk menyampaikan klarifikasi terbuka atas dua pernyataannya itu. Namun jika kedua pernyataannya itu disampaikan dalam kondisi sadar maka harus disertai minta maaf secara terbuka baik dalam rapat paripurna maupun melalui media cetak dan online.



Selasa, 10 Jun 2025 12:23 WIB

**Genjot Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Merata, Pemkab Ngawi Fokus Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

"Kami (Fraksi PKB) meminta Bupati Sidoarjo untuk klarifikasi atas pernyataan-pernyataannya itu. Apalagi, kalau dua pernyataan Bupati itu tidak ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Makanya harus segera diklarifikasi dan meminta maaf kepada para pimpinan dan anggota dewan," pinta politisi senior PKB asal Kecamatan Jabon ini.



Begitu pula Fraksi PDI Perjuangan melalui Jubir Kusumo Adhi Nugraha juga menyampaikan pandangan cukup tegas dan lugas. Yakni Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sidoarjo untuk menarik ucapan dan meminta maaf kepada dewan atas pernyataannya yang sudah memojokkan kinerja dewan.

"Apalagi, pernyataan itu sempat viral di Media Sosial (Medsos) dan media lainnya. Kami Fraksi PDI Perjuangan menunggu itikad baik Bupati karena antara dewan dan Bupati memiliki kedudukan yang sama setara," tegas politisi muda dari Dapil IV Sidoarjo ini.

Sedangkan Fraksi PAN melalui Jubir Bangun Winarso menyatakan antara eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sejajar.

"Karena itu, demi menegakkan marwah DPRD Sidoarjo, maka fraksi kami meminta Bupati untuk menarik ucapannya itu dan meminta maaf secara terbuka," jelasnya.

Begitu pula Fraksi PKS/PPP melalui Jubirnya Vike sangat menyayangkan pernyataan Bupati tentang Pokir dewan dan soal tugas dewan menghamburkan uang itu.



Selasa, 10 Jun 2025 09:41 WIB

**Tingkatkan Kinerja, Ketua DPRD Sidoarjo Ajak Setwan Realisasi Renstra 2025 - 2029 Sesuai Bagian Masing - Masing**

"Karenanya, Fraksi PKS/PPP meminta harua ada klarifikasi secara resmi atas pernyataan itu," pintanya.

Sedangkan Fraksi Nasional Demokrat DPRD Sidoarjo juga merespon kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan Bupati Sidoarjo Subandi itu. Fraksi gabungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat ini juga meminta Bupati Sidoarjo untuk segera menyampaikan klarifikasinya.

Diketahui hubungan antara Bupati dengan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo sempat tegang. Ini menyusul, viral video pendek berdurasi 22 detik yang memojokkan tugas dari 50 pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo pada 19 Maret 2025 lalu.

Dalam video pendek itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan jika selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo bertugas dan bekerja menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo, hanya sebatas untuk menghambur - hamburkan uang.

Kondisi ini membuat sebagian besar pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo merasa disepelekan dan tidak dihargai Bupati Sidoarjo Subandi yang baru menjabat beberapa bulan itu. Bahkan, pernyataan itu hingga berdampak pada aksi boikot pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo saat Paripurna Pertanggung Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 beberapa pekan kemarin. Hel/Waw



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Marwah Dewan Tercoreng,” Paripurna DPRD Sidoarjo Desak Bupati Subandi Minta Maaf



Ryan Karawang

10 Juni 2025 | 20:31



Paripurna DPRD Sidoarjo

**Filesatu.co.id, SIDOARJO** | **RAPAT** Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (10/6/2025) menjadi sorotan utama setelah mayoritas fraksi secara tegas meminta Bupati Sidoarjo, H. Subandi, untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Permintaan ini muncul menyusul pernyataan Bupati yang dinilai merendahkan lembaga legislatif, khususnya terkait tuduhan bahwa DPRD hanya “menghamburkan uang” melalui pokok-pokok pikiran (pokir).



Rapat paripurna ini dibagi dalam dua agenda. **Rapat Paripurna I** diawali dengan pembacaan surat masuk, dilanjutkan dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo mengenai Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Kemudian dilanjutkan dengan **Rapat Paripurna II**, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ketegangan bermula dari pernyataan Bupati H. Subandi dalam sebuah video pendek pada 19 Maret 2025, di mana ia mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kinerja anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo hanya sebatas “menghambur-hamburkan uang.” Pernyataan ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai fraksi di DPRD.

Perwakilan **Fraksi Gerindra** DPRD Sidoarjo, Pratama Yudhiarto, S.H., menjadi salah satu yang paling vokal. Ia dengan tegas meminta Bupati Subandi untuk meminta maaf secara terbuka, baik melalui rapat paripurna di hadapan anggota dewan maupun melalui media cetak dan online.

“Fraksi Gerindra menilai bahwa Kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga sejajar dan merupakan mitra kerja dalam fungsi yang berbeda,” ujar Pratama. Ia menambahkan, “Karenanya, sesuai dengan tata tertib 2024, dan demi mengembalikan marwah dewan, kami memohon kepada saudara bupati untuk minta maaf secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.”

Pernyataan Bupati yang menyebutkan “Pokir tidak sesuai dengan visi misi bupati bisa mengarah korupsi, (DPRD) kene seng golek duit, (DPRD)seng menghamburkan uang” juga menjadi poin keberatan utama dari Fraksi Gerindra.

Senada dengan Gerindra, **Fraksi PKB** DPRD Sidoarjo yang dibacakan oleh M. Rojik, juga meminta Bupati Subandi untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya. FPKB menekankan bahwa lontaran bupati yang menyebutkan DPRD menghamburkan uang sangat perlu untuk diklarifikasi.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Tak kalah keras, **Fraksi PDIP** yang dibacakan oleh Kusumo Adhi Nugraha, secara lugas meminta Bupati H. Subandi untuk meminta maaf dan mencabut ucapannya yang memojokkan dewan.



Sementara itu, **Fraksi Golkar** memilih untuk tidak memberikan komentar apapun atas pernyataan bupati dalam rapat paripurna ini.

**Fraksi PAN**, melalui juru bicaranya H. Bangun Winarso, menyatakan bahwa eksekutif dan legislatif adalah lembaga yang sejajar. Oleh karena itu, demi menegakkan marwah DPRD, Fraksi PAN meminta bupati untuk menarik ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf.

**Fraksi PKS/PPP** juga menyayangkan pernyataan bupati terkait pokir dewan dan tuduhan menghamburkan uang, sehingga mereka juga menuntut adanya klarifikasi. Hal yang sama disampaikan oleh **Fraksi Nasional Demokrat**, yang merespons kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan Bupati Subandi, juga meminta bupati untuk melakukan klarifikasi.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Abdillah Nasih, ini ditutup dengan doa dan menyanyikan Lagu Padamu Negeri. Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Sidoarjo, sebanyak 32 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo hadir dalam persidangan hari ini. Turut hadir pula Forkopimda Sidoarjo, Sekda Sidoarjo, BNNK, para Komandan TNI-Polri, Pemda kepala instansi vertikal, direktur BUMN dan BUMD kepala cabang badan hukum milik negara, Ketua KPU dan Bawaslu Sidoarjo, MUI Sidoarjo, Rektor perguruan tinggi, pimpinan partai politik Kabupaten, wartawan, dan LSM Sidoarjo. \*\*\*





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



LEGISLATIF

## Tegas, Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo Minta Bupati Subandi Klarifikasi Dan Minta Maaf!

Admin — 10/08/2023

Share

🕒 Read Time: 1 Minute, 55 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Fraksi Garuda DPRD Sidoarjo secara tegas meminta kepada Bupati Sidoarjo H.Subandi, untuk meminta maaf secara terbuka baik melalui rapat paripurna di depan anggota dewan, maupun melalui media cetak dan online, atas ucapan yang dirasa mendiskreditkan lembaga dewan.



Permintaan ini disampaikan fraksi Gerindra melalui Pratama Yudhiarto SH, juru bicaranya fraksi dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2024, Selasa (10/6/2025).

“Respon fraksi Gerindra atas pernyataan sikap bupati yang menyebutkan “Pokir tidak sesuai dengan visi misi bupati bisa mengarah korupsi, kene seng golek duit DPRD seng menghamburkan uang.

Fraksi Gerindra menikai bahwa Kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga sejajar dan mitra kerja dalam fungsi yang berbeda. Karenanya Sikap politik sesuai dengan tatib 2024, dan mengembalikan Marwah dewan, dimohon kepada saudara bupati untuk minta maaf secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik,” ujar Pratama.

Tuntutan serupa juga dilontarkan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, yang meminta bupati Subandi untuk klarifikasi atas pernyataannya.

M.Rojik juru bicara FPKB dalam penyampaianya menyatakan bahwa lontaran bupati yang menyebutkan DPRD menghamburkan uang sangat perlu untuk diklarifikasi.

Fraksi PDIP melalui Kusumo Adhi Nugraha juga cukup tegas, meminta bupati untuk menarik ucapan dan meminta maaf atas pernyataan memojokkan dewan yang sudah dilontarkan.

Fraksi Golkar tidak bersuara atas pernyataan bupati.

Fraksi PAN melalui Bangun Winarso selalu juru bicara, menyatakan bahwa eksekutif dan legislatif adalah sejajar, karenanya demi menegakkan Marwah DPRD, maka meminta bupati untuk menarik ucapan dan meminta maaf.

Fraksi PKS/PPP juga menyayangkan pernyataan bupati atas pokir dewan dan menghamburkan uang, sehingga PKS minta ada klarifikasi.

Fraksi Nasional Demokrat, merespon kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan Bupati Subandi, juga meminta bupati untuk klarifikasi.

Seperti diketahui, hubungan antara Bupati dengan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo sempat tegang. Ini menyusul, viralnya video berdurasi 22 detik yang memojokkan tugas dari 50 anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo pada 19 Maret 2025 lalu.

Dalam video pendek itu, Subandi mengatakan jika selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo itu, hanya sebatas untuk menghambur – hamburkan uang.

Bahkan dalam video itu juga ada ajakan untuk menggeruduk kantor DPRD Sidoarjo yang seolah-olah membenarkan pernyataan singkat Bupati Sidoarjo dalam video itu.

Kondisi ini membuat sebagian anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo merasa disepelkan. (Abidin)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

# Pemkab Sidoarjo Respon Keluhan Warga Terkait Penumpukan Sampah di TPS3R Ngampelsari

Redaksi | Juni 10, 2025

0



Jawapos, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turun langsung meninjau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Dusun Kodinding, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Hal tersebut dilakukan Bupati Subandi usai mendapat keluhan dari warga, bahwa TPS 3R di Ngampelsari terjadi tumpukan sampah dan menyebabkan bau menyengat. Apalagi lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.

Bupati Subandi saat sidak bersama Kapolresata, Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (10/6/2025) memerintahkan DLHK untuk mengambil alih pengelolaan TPS 3R Ngampelsari.

"Saya mohon maaf dan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, saya perintahkan DLHK, kepala desa, lurah agar pengelolaan diambil alih kita. Hari ini juga saya minta untuk diselesaikan," katanya.

Subandi berharap, setelah diambil alih DLHK, pengelolaan sampah tersebut bisa lebih tertib, tidak kembali terjadi tumpukan sampah dan bau menyengat.

## Baca Juga

- [Pamkab Sidoarjo Respon Keluhan Warga Terkait Penumpukan Sampah di TPS3R Ngampelsari](#)

Di samping itu, ia terus mendorong pemerintah desa untuk membuat aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

"TPS ini penting karena Ngampelsari padat penduduk. Harus ada ketegasan dari desa, RT, RW, dan semua perangkat agar lingkungan bersih dan sehat," jelasnya.

Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, membanarkan bahwa pihaknya kini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan TPS3R tersebut. Menurutnya, kondisi TPS3R berulang kali menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah.

"Kita selesaikan hari ini juga. Kami kerahkan 15 truk dan alat berat untuk mengangkat dan membersihkan seluruh sampah di lokasi. Setelah bersih, tim kami akan atur ulang tata kelola TPS," jelas Amig.

Amig juga memastikan tidak akan ada kekosongan layanan. Seluruh alur distribusi sampah dari warga tetap berjalan seperti biasa.

"Jangan khawatir. Kami jamin pelayanan tetap berjalan. Ini hanya soal peralihan pengelolaan. Mulai hari ini yang lama sudah domisioner, DLHK yang pegang kendali," pungkasnya.

Sementara itu, Wagiman warga Kodinding, Desa Ngampelsari merasa lega atas gerak cepatnya pemerintah kabupaten dalam menangani masalah sampah di lokasi tersebut. Beliau sudah banyak keberatan permasalahan sampah tersebut tak kunjung ada titik terang.

"Alhamdulillah hari ini permasalahan sampah ini sudah ada titik terang dan kami berharap tidak menimbulkan masalah mulai dari bau tidak sedap, hingga masalah kesehatan," ungkapnya. (Tyaz)